

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aan Komariah Engkoswara. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Achmad Ali. 2002. *Keterputusan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas.
- Amin Tunggal Widjaya. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Jum Angriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon (dkk). 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sadjijono. 2008. *Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

- S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media.
- Sarwoto. 1990. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghala Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- . 2005. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Diskotik
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha

Internet

- Muhammad Zulfan Hakim. 2017. "Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik". Makassar: Jurnal Hukum Islah. <https://core.ac.uk/download/pdf/25489435.pdf>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 21.55
- Sri Syahril., 2019. "Tempat Hiburan Malam Yang Melanggar Segera Ditindak". Info Sulsel, 17 Desember 2019. Makassar <https://infosulsel.com/2019/12/thm-yang-melanggar-segera-ditindak/html>, diakses pada 16 Juni 2020 pukul 20.20
- Sri Syahril., 2017. "Wujudkan Makassar Bebas Prostitusi". Info Sulsel, 10 November 2017, Makassar. <https://infosulsel.com/2017/11/wujudkan-makassar-bebas->

prostitusi-dewan-agendakan-periksa-aktivitas-thm/html, di akses pada 8 Juli 2020 pukul 22.45

Yakin Ahmad., 2019. *“THM Publiq Langgar Jam Operasional Sanksinya Bisa Berupa Pencabutan Izin Usaha”*. Pojok Sulsel, 8 Desember 2019. Makassar. <https://s Sulsel.pojoksatu.id/baca/thm-publiq-langgar-jam-operasional-sanksinya-bisa-pencabutan-izin-usaha>, diakses pada 16 Juni 2020 pukul 20.50

LAMPIRN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PARIWISATA**

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832
E : mksombere@gmail.com] - [T : @mks_sombere] - [W : www.tourism-makassar.id]
Facebook Fanpage: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar

REKOMENDASI

NOMOR : 9449 / DISPAR/008/IX/2020

Menindaklanjuti Surat Dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MAKASSAR, dengan nomor : 503/002/DPMPSTP/IX/2020, Tanggal 15 September 2020, Perihal Izin Penelitian. Maka kami dari Dinas Pariwisata Makassar pada prinsipnya memberikan izin sekaligus memberi Data Survey kepada :

Nama : **MUHAMMAD FADIL PRAWIRA**
NIM / JURUSAN: B12116519 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar
Judul : " **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
STANDAR USAHA DISKOTIK DI KOTA MAKASSAR** "

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 September 2020
Plt. Kepala Sub.Bagian Umum &
Kepegawaian,

Drs. Muhammad Amir
Pangkat : Penata
Nip : 19631231 200801 1 033